

Penyerapan dan Efektivitas Anggaran di Daerah

Diskusi Teknis DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara
Hotel Garden Palace, Surabaya, 17 Feb 2012

Dr. Wahyudi Kumorotomo

Magister Administrasi Publik
Universitas Gadjah Mada

www.kumoro.staff.ugm.ac.id

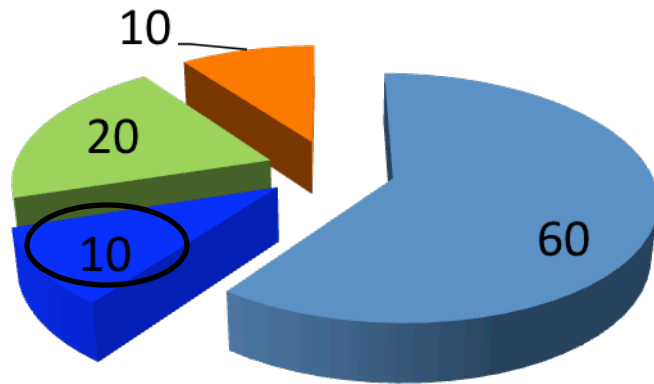
081 328 488 444

Masalah Pokok Anggaran Publik di Indonesia

1. Ekonomi tumbuh (prediksi 2012: 6,3%), tetapi bukan karena didukung anggaran pemerintah.
2. Mekanisme APBN dan APBD tidak sinkron.
3. Peran anggaran dalam peningkatan kesejahteraan rakyat semakin turun.
4. Sebagian besar anggaran publik tersedot untuk biaya operasional birokrasi (gaji, pengeluaran rutin).
5. Prioritas pembangunan belum menyentuh kebutuhan dasar rakyat.
6. Daya serap anggaran turun, sisa anggaran tidak dapat dipergunakan, akuntabilitas anggaran rendah.

Dana Pembangunan Sudah Didaerahkan (?)

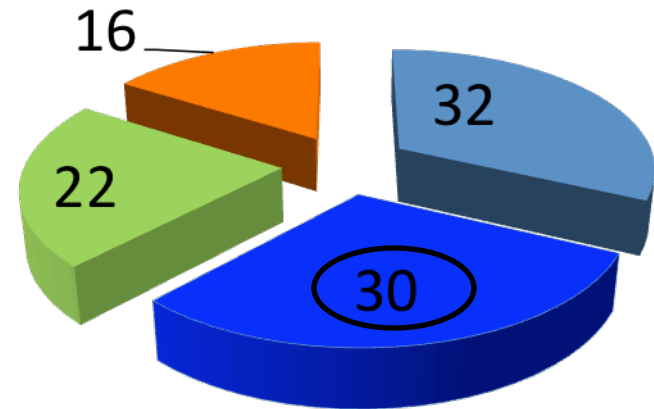
Significant portion transfer increased to Local Government in the state Budget



■ Central Gov ■ Local Gov ■ Subsidy ■ Interest Payment

2000

2010

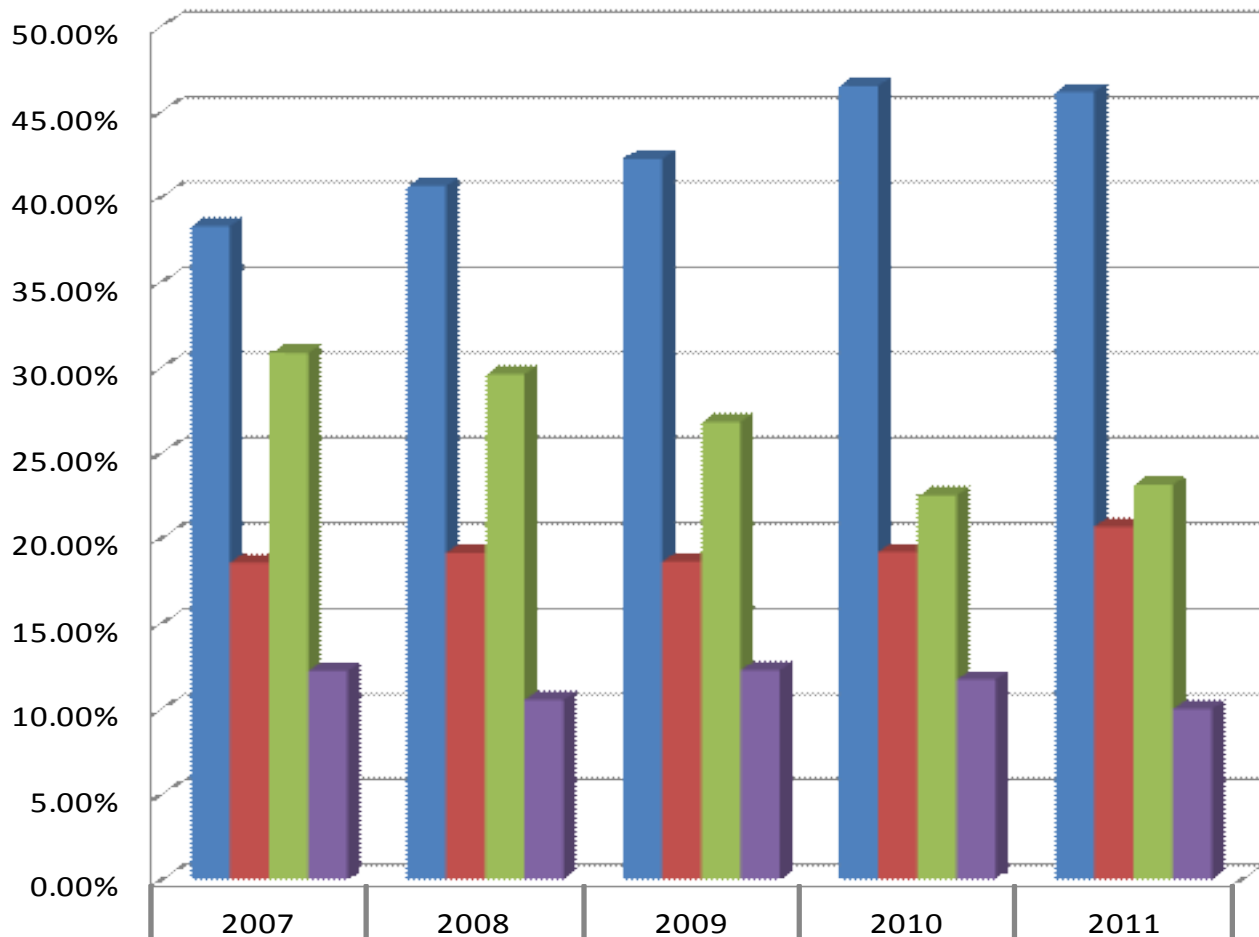


■ Central Gov ■ Local Gov ■ Subsidy ■ Interest Payment

Trend Komposisi Belanja Daerah

Note: data APBD konsolidasi secara nasional

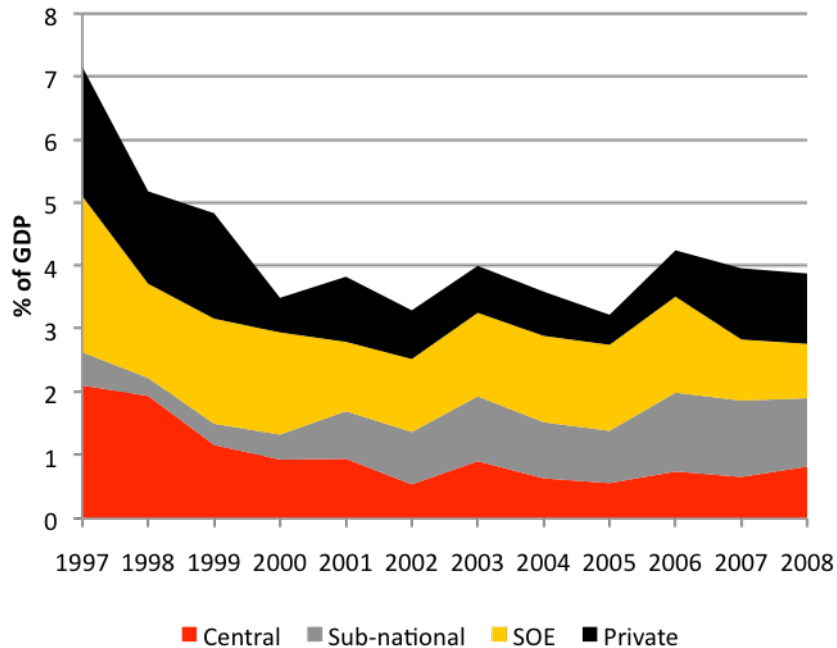
- Porsi belanja pegawai selalu dominan dibandingkan jenis belanja lainnya. Pada tahun 2011, porsi belanja pegawai sbsr 46,16% turun sedikit dibandingkan tahun 2010 .
- Porsi belanja modal mengalami trend menurun selama 2007-2011. Pada tahun 2011, porsis belanja modal terhadap total belanja hanya mencapai 20,7%.



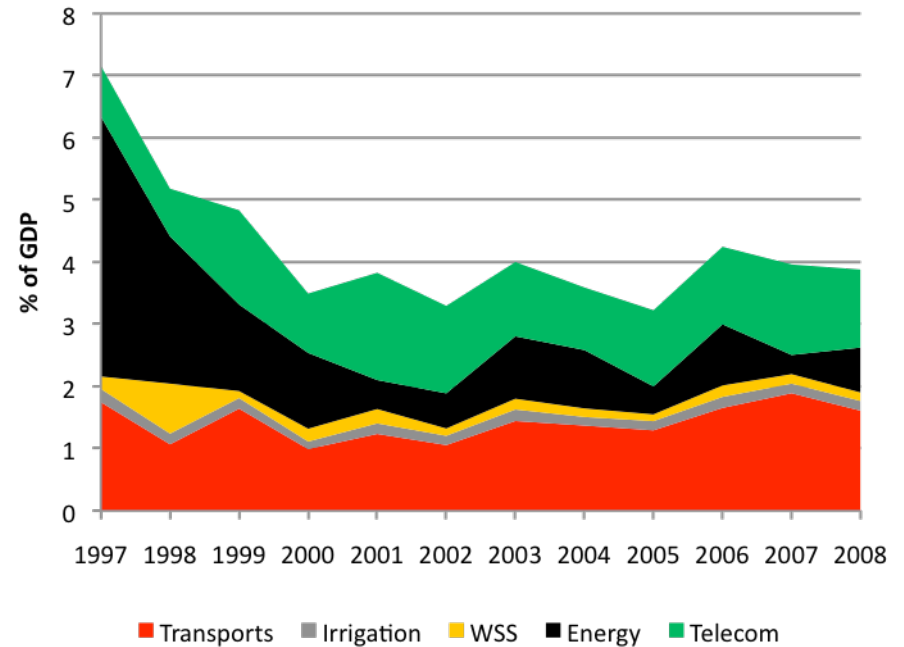
■ Belanja Pegawai	38.29%	40.65%	42.25%	46.52%	46.16%
■ Belanja Barang dan jasa	18.58%	19.16%	18.64%	19.21%	20.69%
■ Belanja Modal	30.87%	29.63%	26.83%	22.53%	23.14%
■ Belanja Lainnya	12.25%	10.55%	12.29%	11.74%	10.01%

Anggaran Publik Tidak Cukup Membiayai Infrastruktur

▶ Total investment in infrastructure, by sources

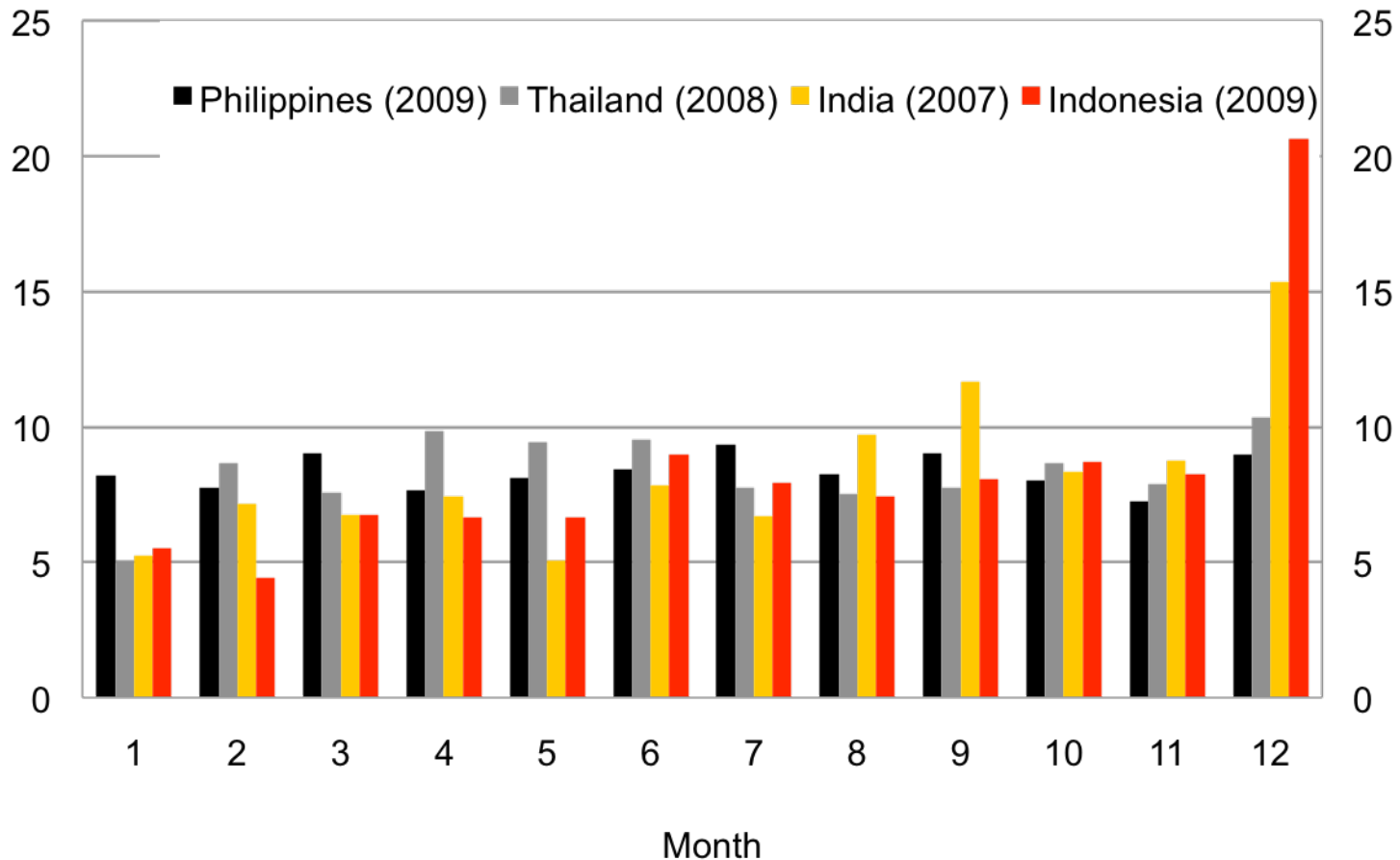


▶ Total investment in infrastructure, by sectors



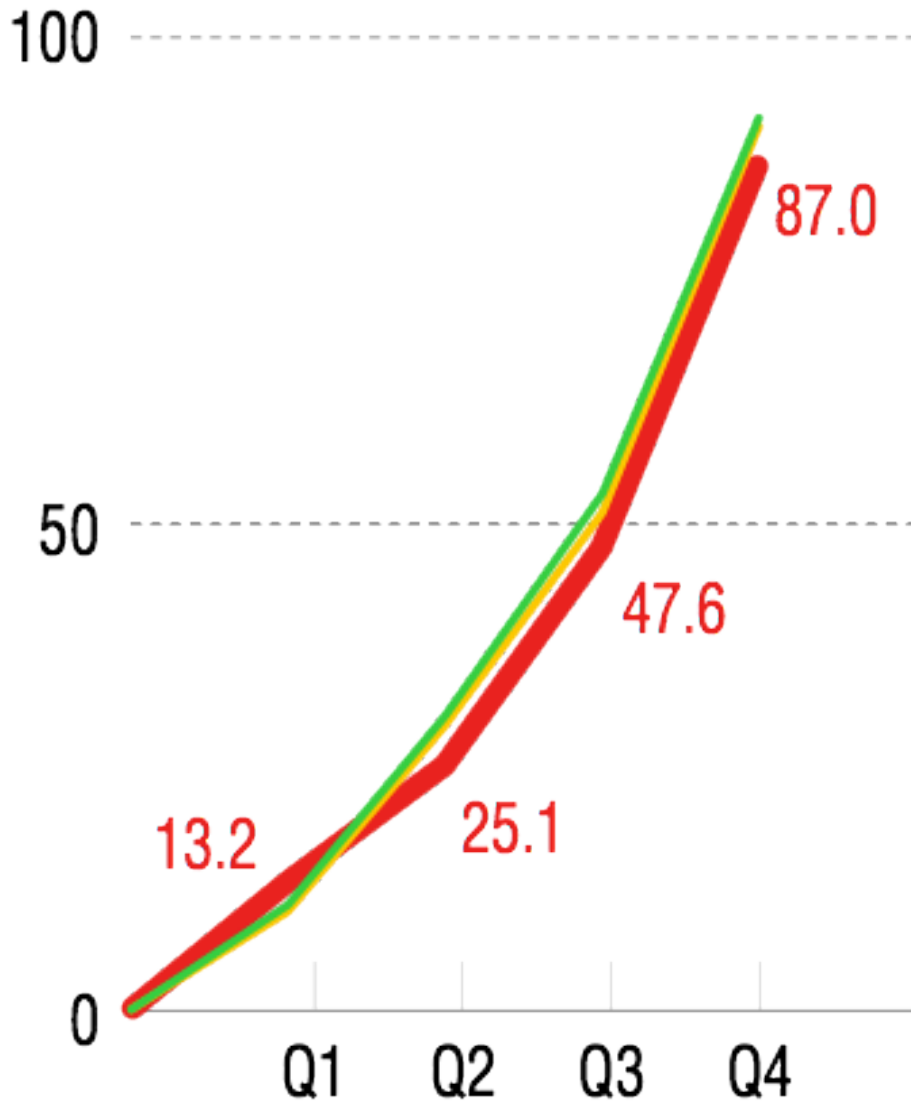
Sources: BPS via CEIC, World Bank

Penyerapan DIPA lebih Lambat dari Negara Lain



Source: CEIC, World Bank

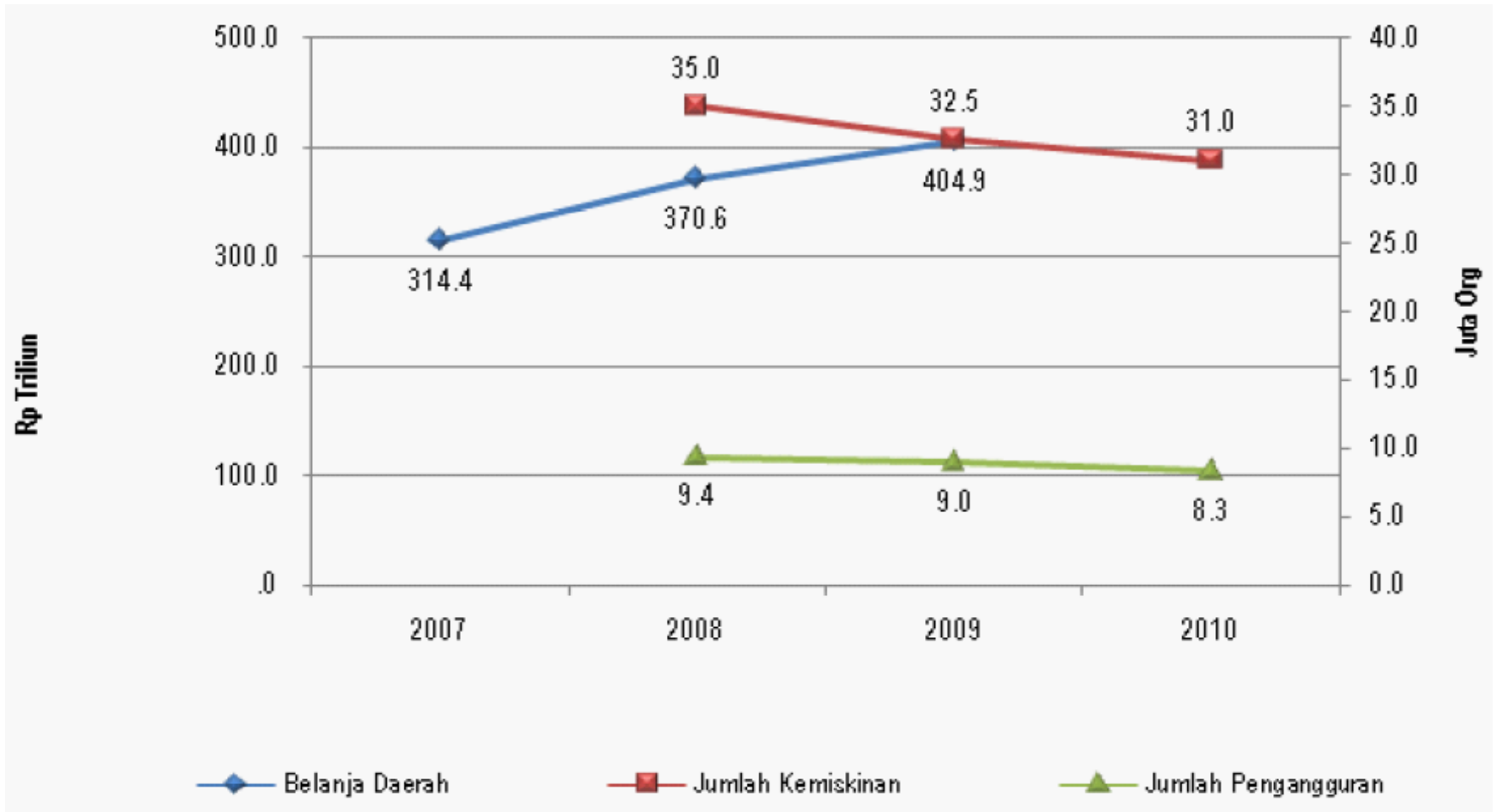
Serapan anggaran 2011



- **Presiden tidak senang** dengan prestasi serapan yang terendah dalam 3 tahun
 - (2009 : 91,8 %)
 - (2010 : 90,9 %)
 - (2011 : 87,0 %)
- Sebesar 270 Triliun terserap hanya di 1 bulan (Desember)
- Terlihat bahwa di Q1 birokrasi belum berbuat banyak selain administrasi gaji

Korelasi Belanja Daerah dg Kemiskinan & Pengangguran

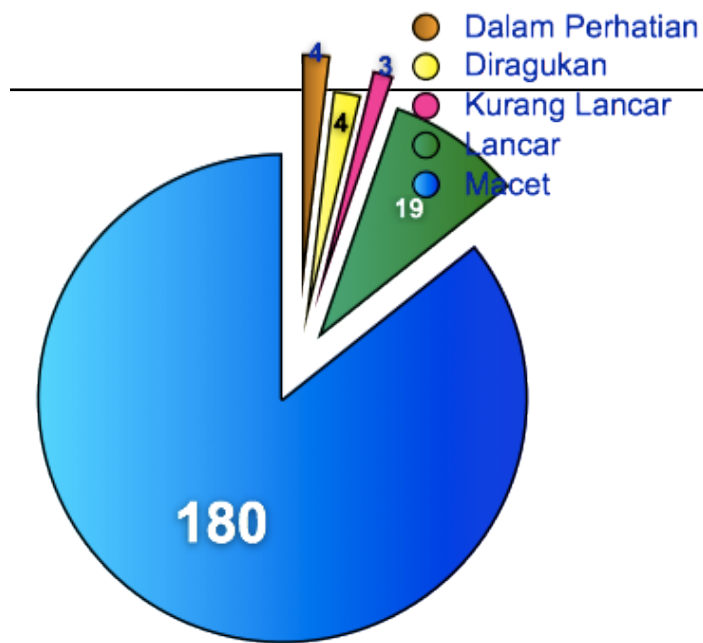
8



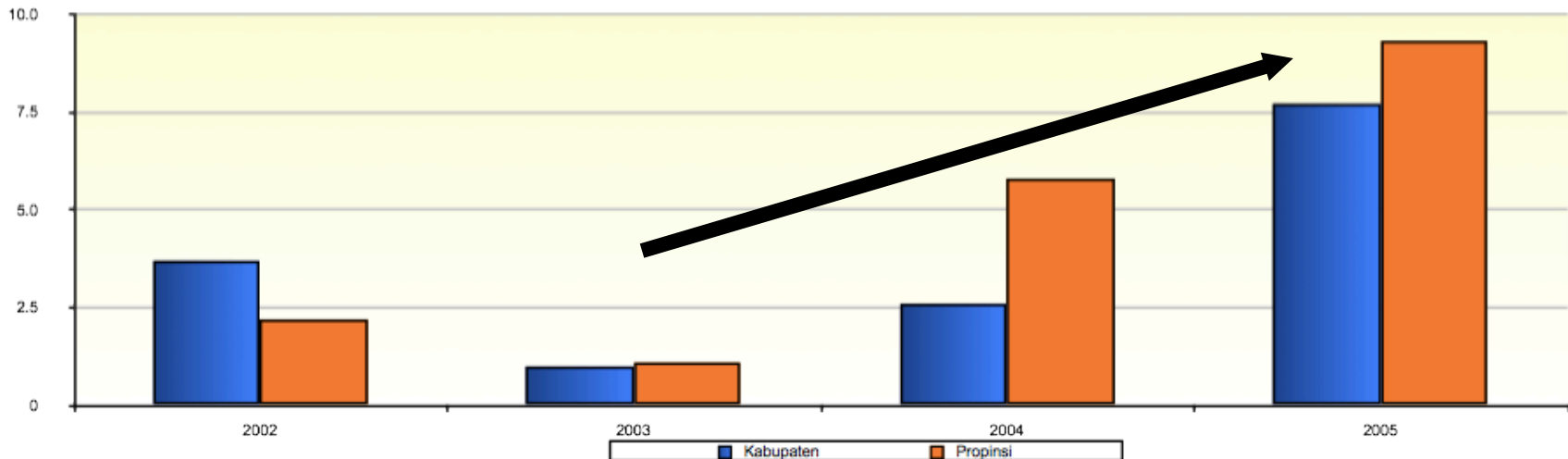
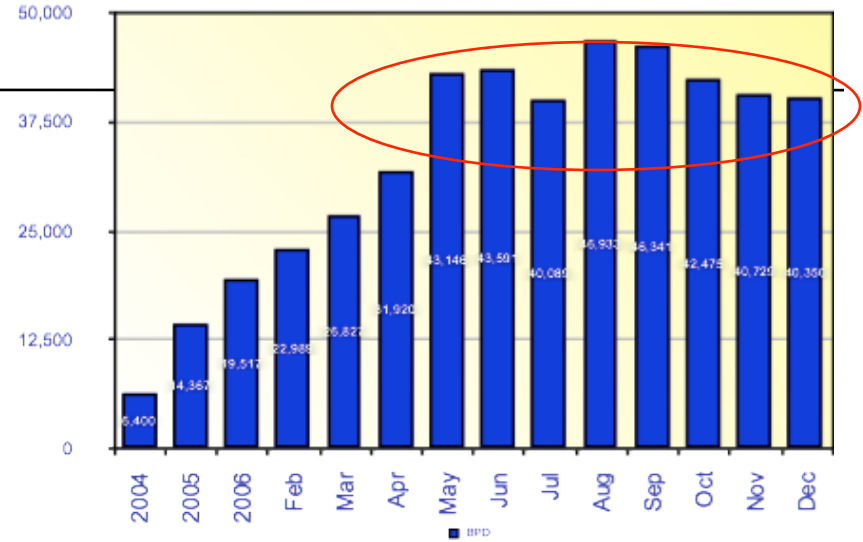
Sumber: DJPK, Kemkeu, 2011

Masalah-masalah Fiskal Daerah

Jumlah PDAM per Status Kredit



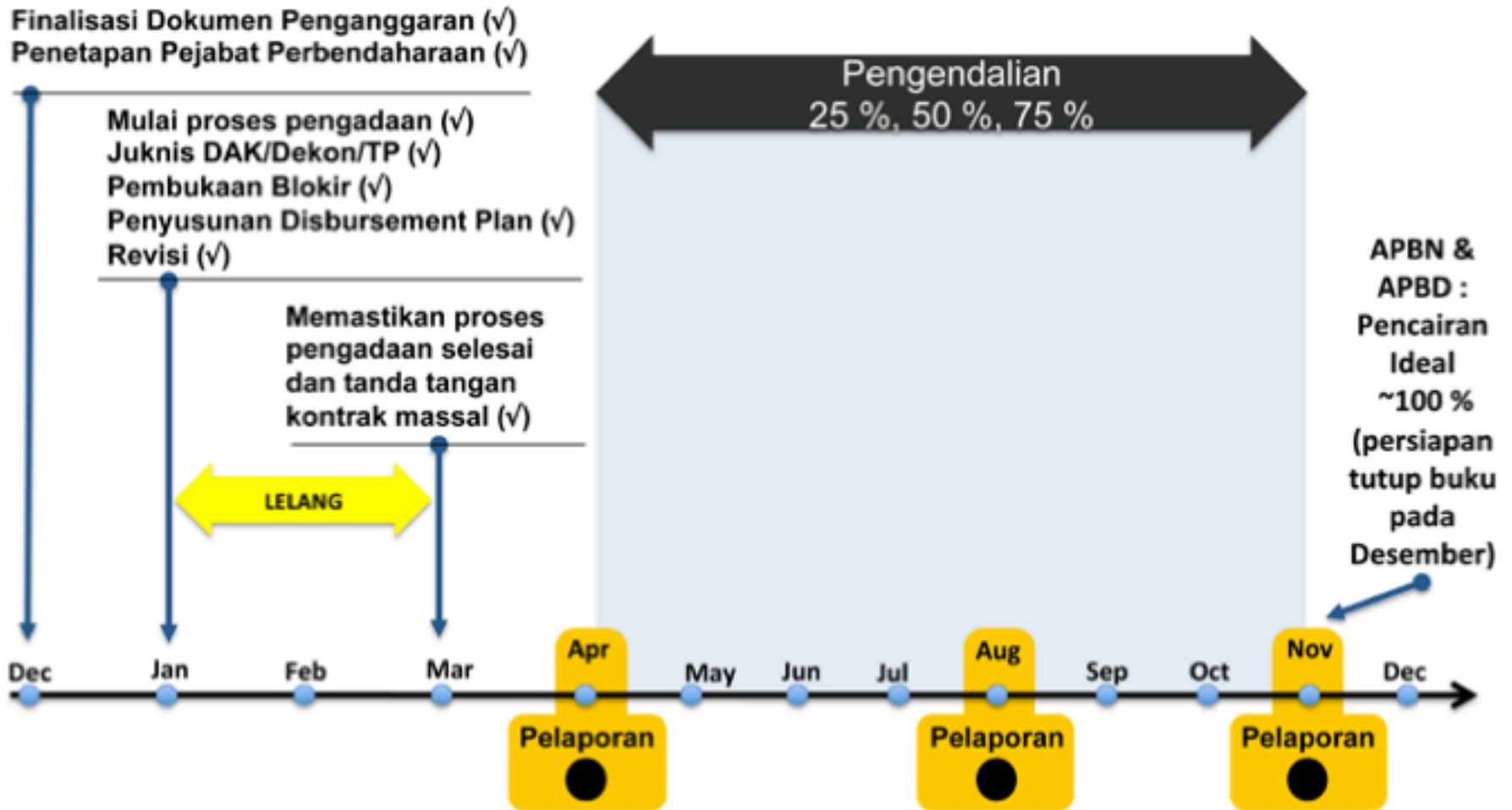
Nilai Pemilikan SBI 1 Bulan dari BPD



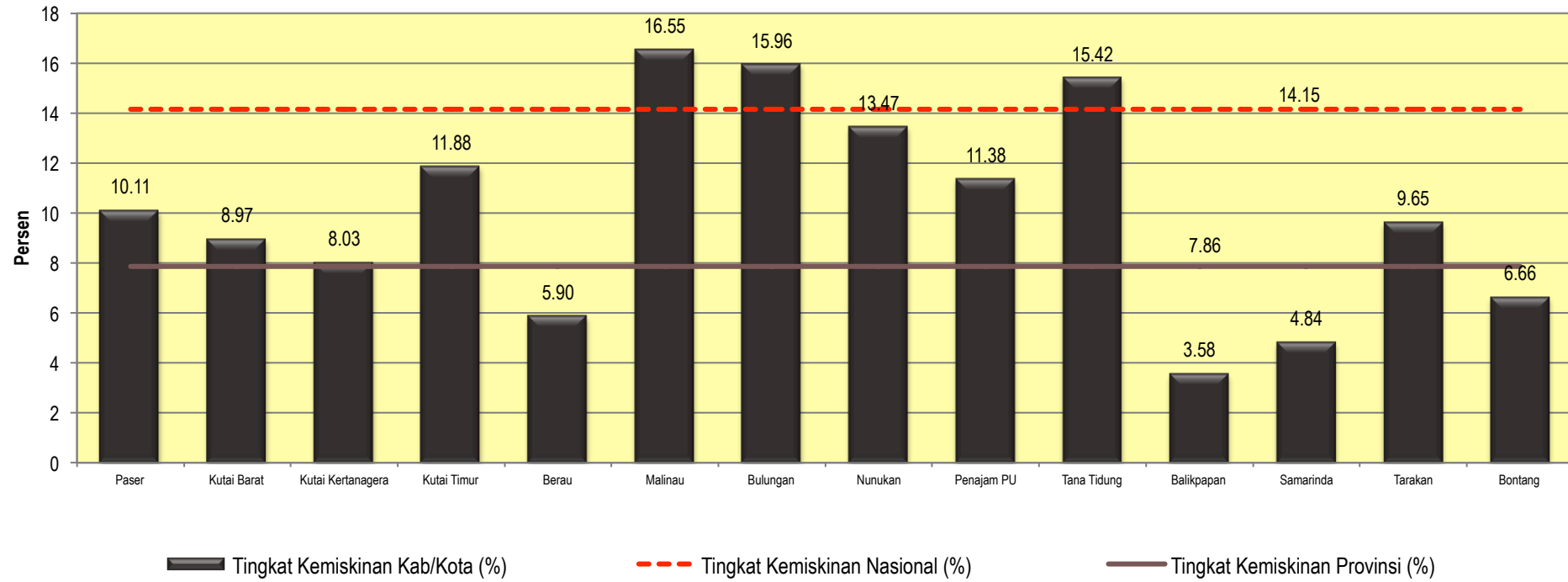
Kebijakan Teknis Percepatan Serapan

	No surat	Isi Surat	Deadline	Dilaporkan
1	TEP/S-1	Percepatan Pelaksanaan Proses Lelang (a. Lelang, b. TT Kontrak)	a. 13 Jan 2012 b. 16 Mar 2012	a. 16 Jan 2012 b. 19 Mar 2012
2	TEP/S-2	Percepatan Penetapan Pejabat Perbendaharaan	30 Des 2011	5 Jan 2012
3	TEP/S-3	Penyusunan Juknis Pelaksanaan DAK, Dana Dekon TP th. 2012	-	14 Jan 2012
4	TEP/S-4	Kelengkapan Data Dukung Administratif Penganggaran	30 Des 2011	5 Jan 2012
5	TEP/S-5	Penyusunan Disbursement Plan untuk Percepatan Penyerapan	13 Jan 2012	16 Jan 2012
6	TEP/S-7	Penunjukan Petugas Penghubung (<i>contact person</i>) di K/L	-	-

Debottlenecking dan Pengendalian Anggaran Th 2012



○ Bagan 5. Perbandingan Tingkat Kemiskinan Kabupaten Kota se Kaltim

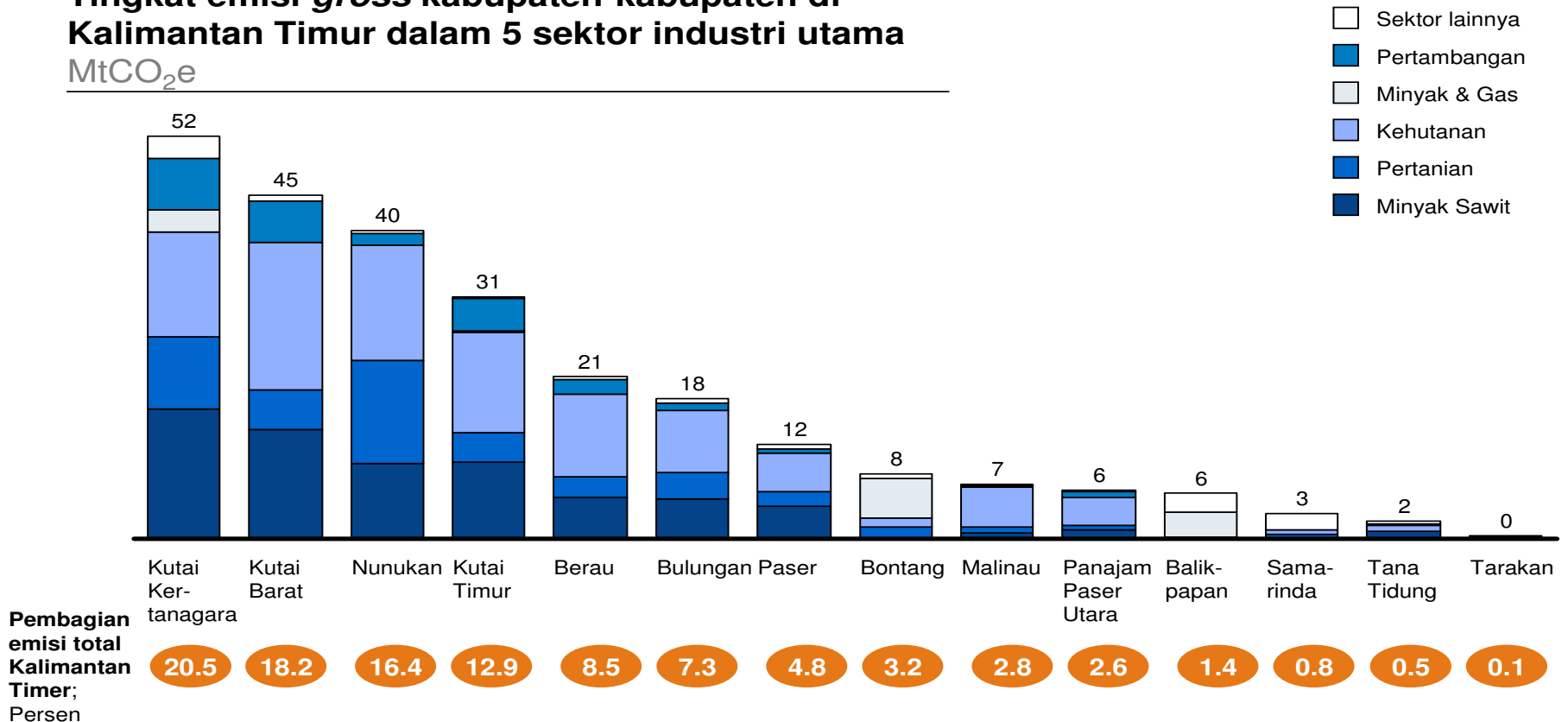


Masalah Lingkungan di Daerah Penghasil Migas

Emisi tidak tersebar merata dimana tiga kabupaten terbesar berkontribusi sebesar lebih dari 50% emisi

CONTOH KALIMANTAN TIMUR

Tingkat emisi *gross* kabupaten-kabupaten di Kalimantan Timur dalam 5 sektor industri utama
MtCO₂e



Sumber: Wetlands International, Statistik Kalimantan Timur, 2009

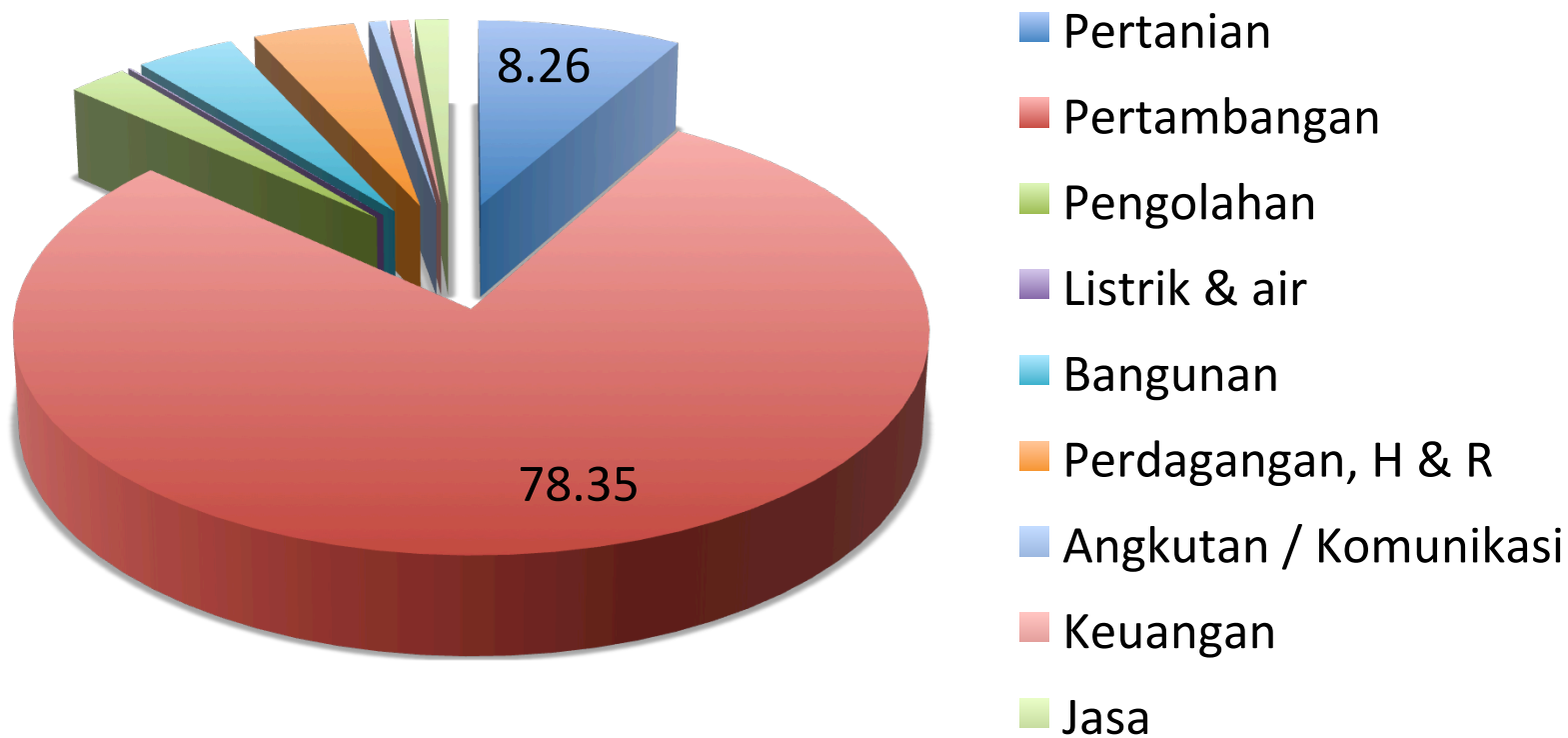
APBD Kab Kukar 2011

Uraian		Jumlah (ribuan rupiah)	% Total Belanja APBD
Total Pendapatan		4,151,286	89.62
	Pendapatan Asli Daerah	130,300	2.81
	Dana Perimbangan	3,495,440	75.46
	Dana Bagi Hasil	3,443,809	74.34
	Pajak Daerah	17,028	0.37
	Lain-lain Pendapatan	91,852	1.98
Total Belanja		4,632,244	100.00
Belanja Tidak Langsung		1,592,892	34.39
	Belanja pegawai	1,023,683	22.10
	Hibah	88,095	1.90
	Bantuan sosial	87,127	1.88
	Bantuan keuangan	270,660	5.84
	Belanja tidak terduga	10,000	0.22
Belanja Langsung		3,039,352	65.61
	Belanja pegawai	332,242	7.17
	Belanja barang & jasa	972,399	20.99
	Belanja modal	1,734,711	37.45
Pembiayaan Daerah		480,958	10.38
	SiLPA	644,640	13.92
	Pengeluaran	163,682	3.53
Defisit		-480,958	-10.38

Masalah Anggaran Pembangunan di Kukar

1. Ketergantungan sangat tinggi pada sektor pertambangan; sumber utama APBD berasal dari DBH.
2. Proporsi belanja modal sudah di atas rerata nasional (37,45%), tetapi belum optimal untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
3. Penyerapan relatif rendah, SiLPA th 2011 sebesar 13,92% dari total belanja APBD.
4. Prioritas bagi pelayanan dasar (pendidikan, kesehatan, jaminan sosial) belum tampak dalam alokasi anggaran.
5. Perlu diversifikasi sumber pendapatan, penajaman prioritas pembangunan yang meningkatkan kesejahteraan.

Penyumbang PDRB Kab Kukar Th 2008 (%)



Tambang Tanpa Reklamasi, Degradasi Lingkungan dan Ancaman Jiwa



Kukar semakin tergantung kepada sektor pertambangan (?) 82% PDRB berasal dari sektor pertambangan.

Bekas galian tambang yang tidak direklamasi bisa menjadi bencana lingkungan di beberapa Kecamatan.



Mis: Beberapa warga di Kelurahan Jawa, Kec Sangasanga telah menjadi korban bekas galian tambang batubara.

Tabel 2. Tingkat Pendidikan Penduduk Kukar

Tingkat Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Total	%
Tidak tamat SD	47,875	57,035	104,910	25.55
SD	53,299	60,452	113,751	27.70
SLTP	55,559	44,364	99,923	24.34
SLTA dan Kejuruan	47,338	29,163	76,501	18.63
Akademi / Diploma	3,450	2,828	6,278	1.52
Universitas	5,793	3,363	9,156	2.23
	213,314	197,205	410,519	100.00

Sumber: Kantor BPS Kukar, 2007

Tabel 3. Pembiayaan Kesehatan dalam APBD Kukar (Rp 000)

Alokasi	2004	2005	2006
Total APBD Kab.	2.199.484.152	2.768.061.552	3.799.294.163
APBD Bid.Kesehatan	28.671.831	34.636.685	39.003.786
APBD Propinsi	500.000	-	-
Proyek HWS	1.669.643	2.740.401	3.323.854
DAK			3.450.000
Total Anggaran Kesehatan	30.841.474	37.387.086	45.777.640
% dari APBD	1,3	1,3	1,02

Sumber: Dinas Kesehatan Kukar, 2007

Gagal Panen di Desa Bukit Raya, Kec Samboja



70 Hektar gagal panen karena tanggul irigasi yang jebol.

Apa yg dapat dilakukan oleh PU, Distan, dan PMD?

Penduduk Miskin di Kukar Th 2005

Kecamatan	Σ KK	%
Muara Muntai	640	15.43
Loa Kulu	1,182	13.69
Muara Jawa	726	13.02
Samboja	2,513	19.85
Loa Janan	859	5.79
Sanga Sanga	727	20.39
Anggana	730	12.31
Muara Badak	1,042	11.35
Marang Kayu	1,170	13.79
Tenggarong	1,574	9.42
Tenggarong Seberang	1,944	15.55
Sebulu	1,131	15.22
Muara Kaman	1,454	19.89
Kota Bangun	1,545	22.66
Muara Wis	412	21.75
Kenohan	714	22.72
Kembang Janggut	710	12.6
Tabang	158	6.57

Kutai Kartanegara termasuk kabupaten yang beruntung pada masa desentralisasi; APBD meningkat tajam karena DBH pertambahan.

Rakyat Kukar menunggu apakah limpahan dana pembangunan itu benar-benar dapat meningkatkan kesejahteraan mereka.

TERIMA KASIH